



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

IMPLIKASI RE-DESAIN DESENTRALISASI FISKAL INDONESIA PADA KEPUTUSAN ANGGARAN
PROVINSI DI INDONESIA
(Studi Keputusan Anggaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Pasca Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022)
Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah)
Amzul Zuhdi, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo M.P.P
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh **INTISARI** <http://edirepository.ugm.ac.id/>

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia, terutama sejak era reformasi telah memberikan berbagai implikasi dan dampak langsung dan tidak langsung dalam proses penyelenggaraan pemerintahan ditingkat daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal yang mengatur tentang bagaimana hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia mengalami berbagai perubahan dan perkembangan. Seiring perkembangan dan perjalannya, kebijakan desentralisasi fiskal Indonesia terbaru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) sebagai bentuk desain kebijakan desentralisasi fiskal terbaru yang mengatur tentang penerimaan pendapatan daerah dan pengaturan tentang pengalokasian anggaran daerah telah memulai babak baru dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah.

Kebijakan re-desain desentralisasi fiskal secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi pengelolaan anggaran daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan melakukan analisis mendalam tentang bagaimana implikasi re-desain desentralisasi fiskal pada keputusan anggaran daerah dengan menggunakan konsep implikasi desentralisasi fiskal (Faguet dan Sanchez, 2021) dan keputusan anggaran (Lee et.al, 2013). Melalui konsep yang digunakan, penelitian menganalisis dan menjelaskan bagaimana dengan bentuk desain kebijakan desentralisasi fiskal yang baru akan mempengaruhi pengambilan keputusan anggaran. Analisis mendalam yang digunakan oleh peneliti menggunakan metode dan pendekatan kualitatif. Pengumpulan dan pengambilan data penelitian menggunakan wawancara mendalam dan analisis dokumen terkait, kemudian dilengkapi dengan berbagai literatur empiris yang relevan. Kemudian diolah secara sistematis dan interaktif untuk mendapatkan hasil penelitian dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui kebijakan re-desain desentralisasi fiskal, setiap daerah dapat dipastikan memperjelas arah dan tujuan pembangunan yang seragam untuk optimalisasi pembangunan. Kemudian, dengan berlakunya kebijakan re-desain desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa telah mengubah paradigma pengelolaan anggaran daerah, baik dari penerimaan pendapatan daerah dan sistem transfer antar pemerintah melalui keterbukaan berbagai peluang sektor perekonomian dan pendapatan daerah tergantung bagaimana perkembangan fiskal daerah. Pembentukan alokasi belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah pasca kebijakan re-desain desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa terdapat peningkatan keterpaduan anggaran, penciptaan anggaran konservatif dengan aspek prudentiality (kehati-hatian), dan meminimalkan risiko keuangan pada anggaran daerah.

Kata kunci: implikasi kebijakan, desentralisasi fiskal, keputusan anggaran



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

IMPLIKASI RE-DESAIN DESENTRALISASI FISKAL INDONESIA PADA KEPUTUSAN ANGGARAN
PROVINSI DI INDONESIA
(Studi Keputusan Anggaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Pasca Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022)
Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah)
Amzul Zuhdi, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo M.P.P
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari ejournal.repository.ugm.ac.id/

ABSTRACT

The implementation of fiscal decentralization in Indonesia, especially since the reform era, has had various direct and indirect implications and impacts on the process of administering government at the regional level. The fiscal decentralization policy regulates how the financial relationship between the central government and regional governments in Indonesia experiences various changes and developments. Along with its development and journey, Indonesia's latest fiscal decentralization policy through Law Number 1 of 2022 concerning Central and Regional Financial Relations (UU HKPD) as a form of design for the latest fiscal decentralization policy which regulates regional income receipts and regulations regarding regional budget allocations has begun the process. new in implementing fiscal decentralization and regional financial management.

The fiscal decentralization redesign policy will directly and indirectly affect regional budget management and regional government administration. By conducting an in-depth analysis of the implications of fiscal decentralization redesign on regional budget decisions using the concept of implications of fiscal decentralization (Faguet and Sanchez, 2021) and budget decisions (Lee et.al, 2013). Through the concepts used, the research analyzes and explains how the new form of fiscal decentralization policy design will influence budget decision making. The in-depth analysis used by researchers uses qualitative methods and approaches. Collecting and retrieving research data uses in-depth interviews and analysis of related documents, then complemented by various relevant empirical literature. Then it is processed systematically and interactively to obtain research results and draw conclusions.

The research results show that through the fiscal decentralization redesign policy, each region can be assured of clarifying uniform development directions and goals to optimize development. Then, with the enactment of the fiscal decentralization redesign policy, it shows that the regional budget management paradigm has changed, both from regional revenue receipts and the intergovernmental transfer system through opening up various opportunities in the economic sector and regional revenues depending on how regional fiscal developments are. The formation of regional expenditure allocations and regional financing policies after the fiscal decentralization redesign policy shows that there is an increase in budget integration, the creation of conservative budgets with aspects prudentiality (prudence), and minimizing financial risks to regional budgets.

Keywords: policy implications, fiscal decentralization, budget decisions